

CASCADING TAHUN 2016 BIRO HUMAS, PROTOKOL DAN UMUM

KEPALA BIRO HUMAS, PROTOKOL DAN UMUM			
Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan
Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Penyebaran Informasi secara luas dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat Jawa Barat	Menyelenggarakan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kepegawaian dan Keprotokolan dan meningkatkan tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan	Menyelenggarakan pelayanan kepada pimpinan dan aparat di bidang kerumahanggaan, dan infrastruktur telekomunikasi di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	Melaksanakan pelayanan di bidang administrasi keuangan di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Sasaran 1	Sasaran 2	Sasaran 3	Sasaran 4
1.1 Terpenuhiya pelayanan permohonan informasi	2.1 Terpenuhiya Administrasi Ketatausahaan dan Kearsipan, Terpenuhiya Fasilitas Pelayanan pimpinan dan Terlaksananya Fasilitas Forum OPD Bidang Administrasi	3.1 Terpenuhiya kebutuhan dasar kantor di lingkup kantor Sekretariat daerah Prov. Jawa Barat dan Rumah Dinas Pimpinan	4.1 Terpenuhiya pelayanan administrasi keuangan di lingkup sekretariat daerah prov. Jawa barat
1.2 Tersebar nya publikasi kebijakan pemerintah provinsi jawa barat	2.2 Terfasilitasi dan Terkoordinasikannya Kegiatan-kegiatan Pimpinan, Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional, Terselenggaranya Pembinaan Etika Perilaku & Kepribadian Bagi Petugas Protokol	3.2 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	
1.3 Terdokumentasikannya kegiatan pimpinan	2.3 Terpenuhiya Pelayanan kepegawaian serta meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin aparat di lingkup Sekretariat Daerah	3.3 Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Aparatur Setda	
Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :
1.1. Persentase permohonan informasi yang terpenuhi	2.1. Persentase terpenuhiya administrasi ketatausahaan dan kearsipan, terpenuhiya fasilitas pelayanan pimpinan, terpenuhiya dan terlaksananya fasilitas forum OPD Bidang Administrasi	3.1. Persentase terpenuhiya kebutuhan dasar kantor di lingkup kantor Sekretariat daerah Prov. Jawa Barat dan Rumah Dinas Pimpinan	4.1. Jumlah dokumen pertanggungjawaban belanja yang terverifikasi
1.2. Persentase publikasi kebijakan yang tersebar di prov. Jawa barat	2.2. Persentase terfasilitasi dan terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan pimpinan, terselenggaranya peringatan Hari Besar Nasional, terselenggaranya pembinaan etika perilaku & kepribadian bagi petugas protokol	3.2. Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	4.2. Jumlah SPM yang diterbitkan
1.3 Jumlah kegiatan pimpinan yang terdokumentasikan	2.3 Persentase terpenuhiya Pelayanan kepegawaian serta meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin aparat di lingkup Sekretariat Daerah	3.3. Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Aparatur Setda	4.3. Tersedianya laporan keuangan Sekretariat Daerah Prov. Jawa Barat

KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT			KEPALA BAGIAN PROTOKOL, TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN			KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA			KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN		
Sasaran :			Sasaran :			Sasaran :			Sasaran :		
1 Meningkatkan publikasinya kebijakan, program dan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat			1 Terpenuhiya pelayanan ketatausahaan dan kearsipan			1 Terpenuhiya kebutuhan dasar operasional kantor			1 Kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pengelolaan keuangan		
2 Terwujudnya Penyelenggaraan kehumasan sesuai dengan peraturan			2 Terfasilitasinya kunjungan tamu Pemerintah Prov. Jawa Barat dan Penyelenggaraan Keprotokolan			2 Terpeliharanya sarana dan prasarana aparat			2 Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		
3 Meningkatnya pelayanan informasi daerah			3 Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian			3 Tersedianya Pelayanan di lingkup Rumah Tangga			3 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Setda		
Indikator :			Indikator :			Indikator :			Indikator :		
1.1. Terselenggaranya publikasinya, program dan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui media cetak, radio, televisi, online dan media luar ruang			2.1. Persentase pelayanan ketatausahaan dan kearsipan yang terpenuhi			2.1. Persentase terpenuhiya pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya			4.1. Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pengelolaan keuangan		
1.2. Terselenggaranya kehumasan			2.2. Terfasilitasinya kunjungan tamu Pemerintah Prov. Jawa Barat dan Penyelenggaraan Keprotokolan			2.2. Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparat			4.2. Persentase tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		
1.3 Terselenggaranya pelayanan informasi daerah			2.3. Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian			2.3. Persentase tersedianya fasilitas pelayanan di lingkup rumah tangga			4.1. Opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Setda		
Subbagian Pemberitaan	Kepala Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan	Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi Daerah	Kepala Subbagian Protokol	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Kepegawaian Setda	Kepala Subbagian Rumah Tangga Pimpinan	Kepala Subbagian Rumah Tangga Setda	Kepala Subbagian Sandi dan Telekomunikasi	Kepala Subbagian Anggaran	Kepala Subbagian Penatausahaan	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Hari jadi Masyarakat	Tersosialisasikannya Kebijakan, Program dan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Media Cetak, Radio, Televisi, Online dan Media Luar Ruang	Meningkatnya Pelayanan Informasi Daerah	1. Terfasilitasi dan terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan pimpinan dalam rangka menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat	1. Terpenuhiya kebutuhan dasar operasional Biro HPU khususnya Sub Bagian Tata Usaha dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	1. Meningkatnya Kinerja dan Kompetensi PNS Setda Provinsi Jawa Barat	1. Terfasilitasinya pelayanan di lingkup Rumah Tangga Pimpinan	1. Terpenuhiya kebutuhan dasar operasional kantor Sekretariat Daerah Prov. Jawa Barat	1. Meningkatnya penyusunan Standarisasi Pelayanan Publik	1. Terfasilitasi dan terkoordinasikannya penyusunan RKA, DPA Setda dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun anggaran 2017; pergeseran dan perubahan DPA Setda, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun anggaran 2016	1. Laksananya penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1. Tersusunnya Laporan Keuangan Setda (Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan)
2. Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan tentang Pemerintah	Meningkatnya Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pelayanan Peliputan Kegiatan Pimpinan serta Terdokumentasikannya Kegiatan Pimpinan	Meningkatnya minat baca pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	2. Terselenggaranya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Besar Instansional	2. Terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas staff ahli Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/kota	2. Meningkatnya Motivasi dan Kinerja PNS Setda Provinsi Jawa Barat	2. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	2. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kebutuhan Teknologi Informasi (IT)	2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kebutuhan Teknologi Informasi (IT)	2. Tersusunnya program dan anggaran Setda secara tepat waktu	2. Terfasilitasi dan terkoordinasikannya penatausahaan keuangan Setda	2. Terlaksananya penerbitan pengesahan SPI Bulanan Setda
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Kehumasan							3. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Telekomunikasi di Biro Humas, Protokol dan Umum	3. Terlaksananya akuntabilitas perencanaan anggaran Setda	3. Tersusunnya laporan keuangan Setda, dan laporan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3. Tersusunnya laporan keuangan Setda, dan laporan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3. Tersusunnya laporan keuangan Setda, dan laporan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Hari Jadi Jawa Barat	1. Terselenggaranya Publikasi Kebijakan, Program dan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Media Cetak, Radio, Televisi, Online dan Media Luar Ruang	1. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Daerah	1. 1. Jumlah Kegiatan Kunjungan tamu Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1. Terlaksananya perjalanan dinas untuk menghadiri, mendampingi, dan mengikuti kegiatan kunjungan kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta mengirimkan surat dan undangan di daerah Provinsi Jawa Barat	1. 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan	1. Persentase tersedianya fasilitas pelayanan di lingkup Rumah Tangga Pimpinan	1. Persentase kantor Sekretariat Daerah Prov. Jawa Barat yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	1. Tersedianya Fasilitas Listrik, Air, Internet, TV Kabel dan Konsesi Radio	4.1. Persentase terfasilitasi dan terkoordinasikannya penyusunan RKA, DPA Setda dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun anggaran 2017; pergeseran dan perubahan DPA Setda, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun anggaran 2016	4.2. Persentase penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.3. Jumlah Dokumen laporan keuangan Setda (Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan)
2. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan tentang Pemerintah Provinsi Jawa Barat	2. Terselenggaranya koordinasi dengan kabupaten/kota dan pelayanan peliputan kegiatan pimpinan serta terdokumentasikannya kegiatan pimpinan	2. Terselenggaranya Fasilitas Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	2. Jumlah Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pimpinan	2. Tersusunnya agenda pertemuan dan kerjasama antara staf ahli Provinsi dengan staf ahli Kabupaten/Kota di masing-masing bidang terkait	2. Sarana Penunjang Administrasi Kepegawaian	2. Persentase sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin	2. Tersedianya Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana IT	2. Persentase terfasilitasi dan terkoordinasikannya penatausahaan keuangan Setda	4.1. Persentase tersusunnya program dan anggaran Setda secara tepat waktu	4.2. Persentase terfasilitasi dan terkoordinasikannya penatausahaan keuangan Setda	4.3. Penerbitan pengesahan SPI bulanan Setda
3. Terselenggarakannya Kehumasan			2. 1. Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional 2. Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Instansional	2. 1. Tersusunnya agenda pertemuan dan kerjasama antara staf ahli Provinsi dengan staf ahli Kabupaten/Kota di masing-masing bidang terkait 2. 1. Pelayanan kesehatan Pegawai	2. 1. Pelayanan kesehatan Pegawai 2. Fasilitas Olahraga Pegawai	2. Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana telekomunikasi di Biro HPU	2. Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana telekomunikasi di Biro HPU	2. Persentase terfasilitasi dan terkoordinasikannya penatausahaan keuangan Setda	4.1. Persentase terlaksananya akuntabilitas perencanaan anggaran Setda	4.2. Persentase terfasilitasi dan terkoordinasikannya penatausahaan keuangan Setda	4.3. Jumlah Dokumen laporan keuangan setda dan laporan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.3. Jumlah dokumen laporan belanja pegawai Setda